



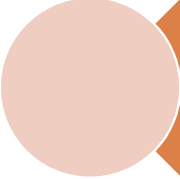
INTERVENSI PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM

“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing”

Rahma Iryanti
Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Deputi Kepala Bappenas

Jakarta, 15 Juni 2017

MATERI PEMAPARAN



Profil UMKM



Tantangan dan Kendala



Meningkatkan Produktivitas
UMKM



Dukungan Pemerintah



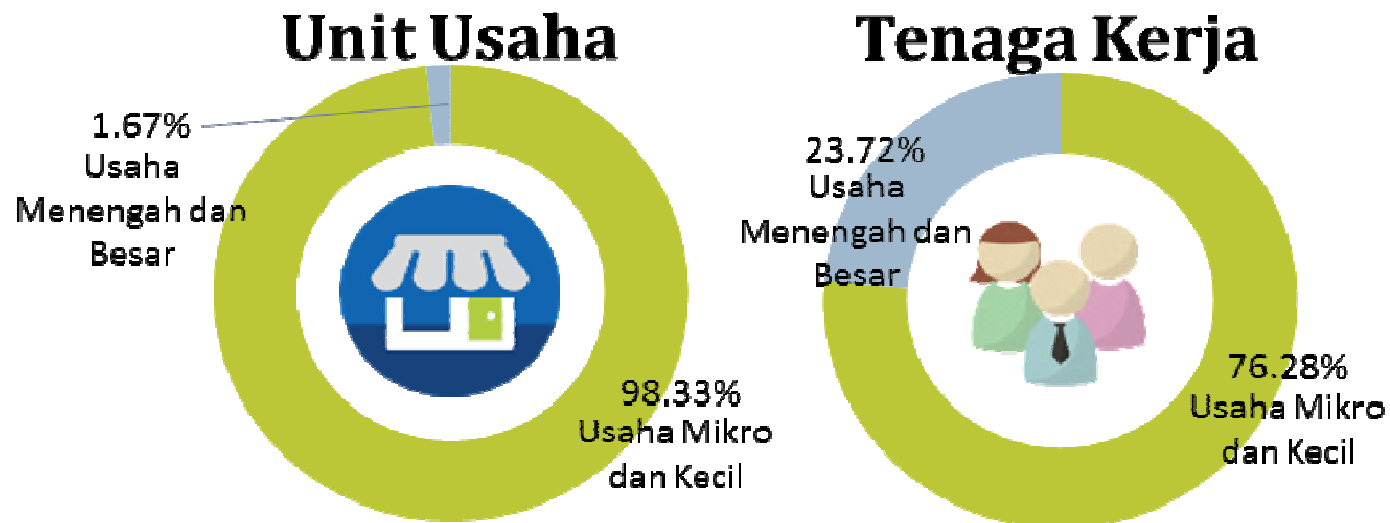
*Kementerian PPN/
Bappenas*

PROFIL UMKM

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (1)

SEKTOR NON PERTANIAN

Proporsi Usaha Mikro dan Kecil dibandingkan Usaha Menengah dan Besar

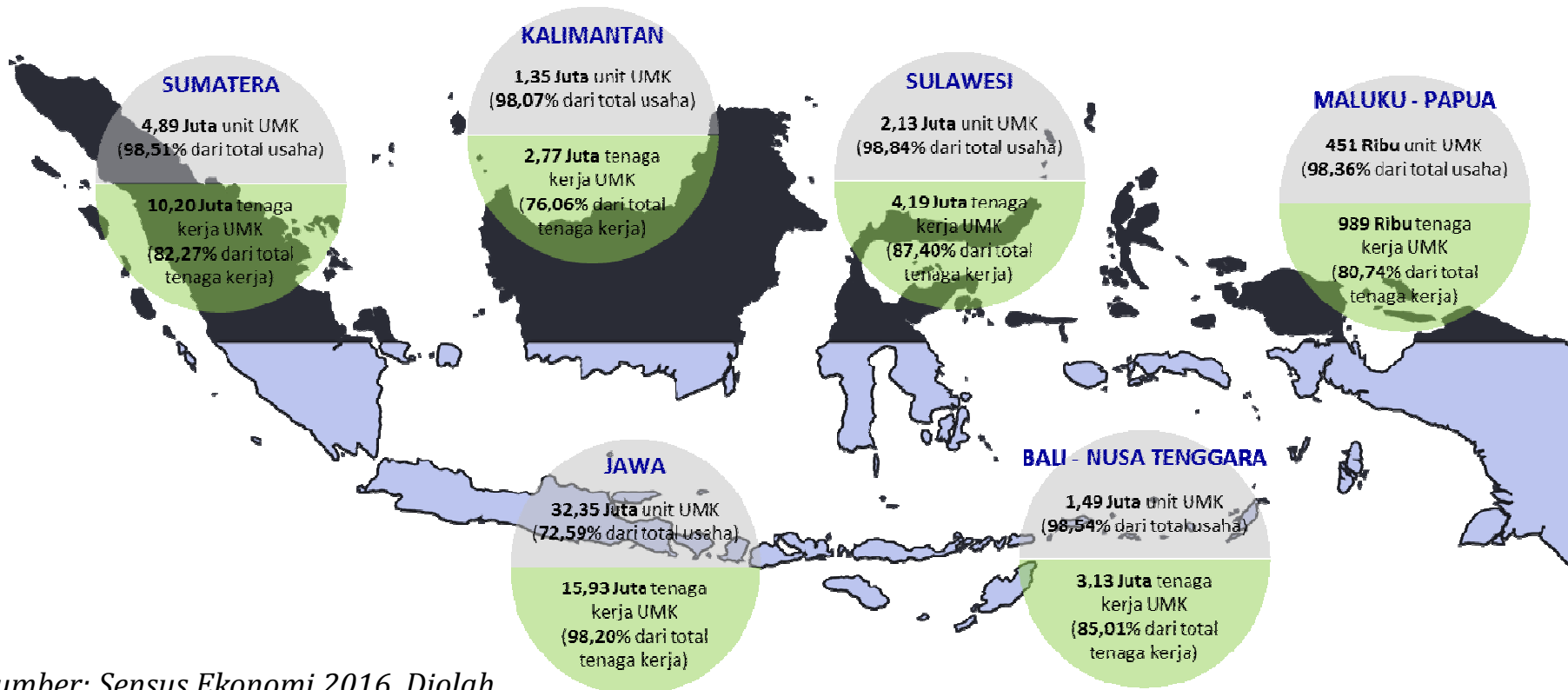


Sumber: Sensus Ekonomi 2016, Diolah

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (2)

SEKTOR NON PERTANIAN

Distribusi Wilayah Usaha Mikro dan Kecil dibandingkan Usaha Menengah dan Besar

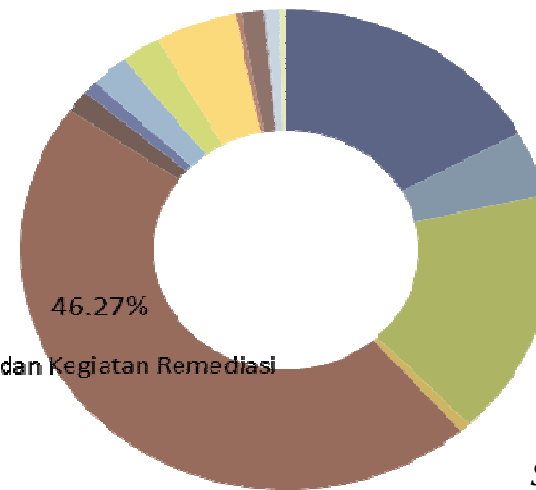
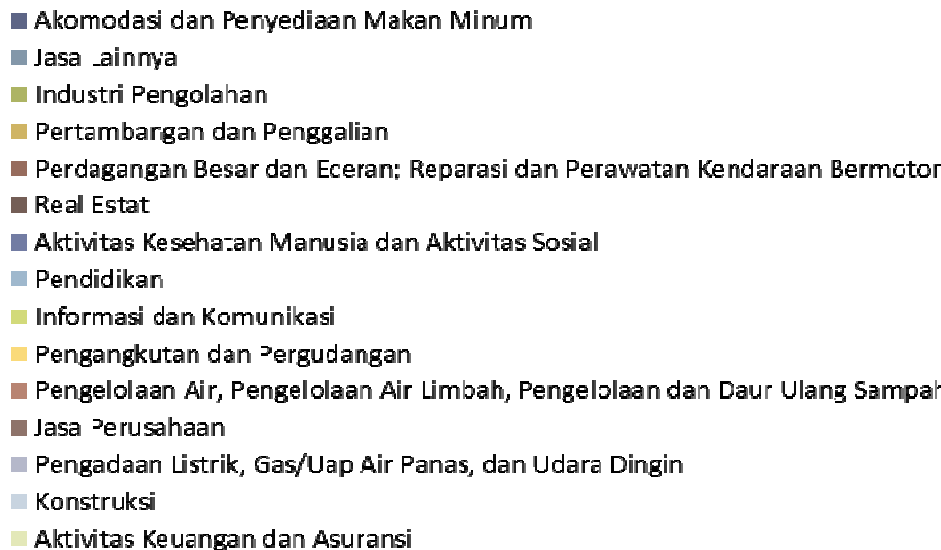


Sumber: Sensus Ekonomi 2016, Diolah

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (3)

SEKTOR NON PERTANIAN

Distribusi Sektor Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Lapangan Usaha



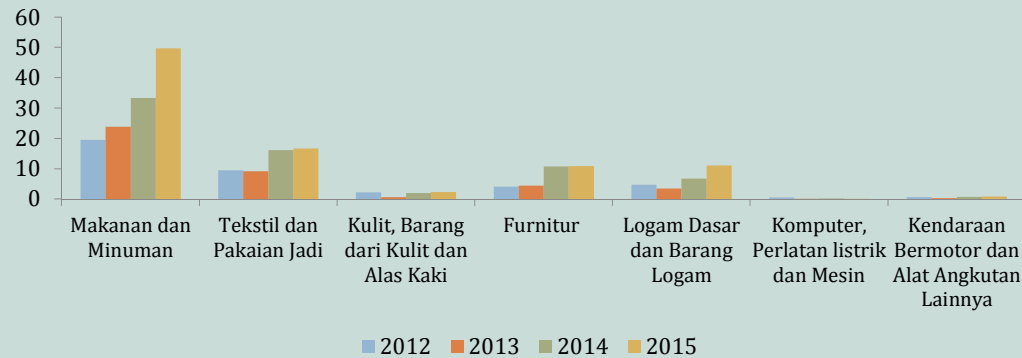
Sumber: Sensus Ekonomi 2016, Diolah

- a. Secara nasional, jumlah unit usaha mikro dan kecil (UMK) mendominasi sekitar 98,33 persen dari total unit usaha secara keseluruhan dan kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja nasional adalah sebesar 76,28 persen.
- b. Tiga lapangan usaha UMK didominasi oleh 1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor, 2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, dan 3) industri pengolahan.
- c. Tiga wilayah penyebaran sektor UMK paling besar adalah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

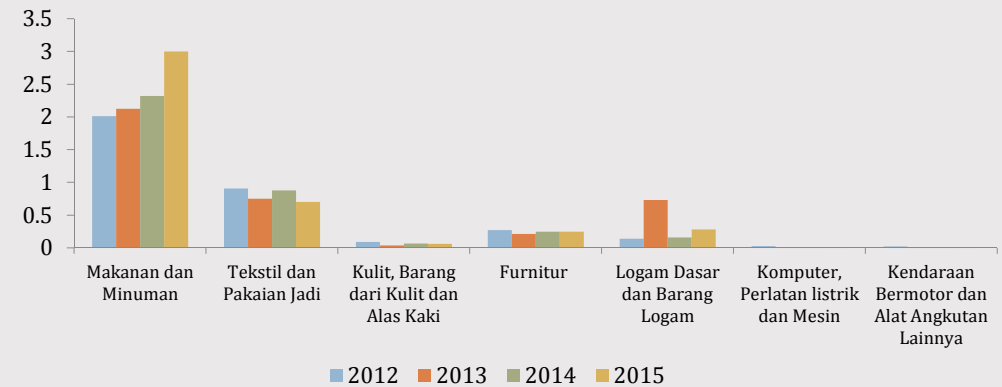
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (4)

SEKTOR INDUSTRI

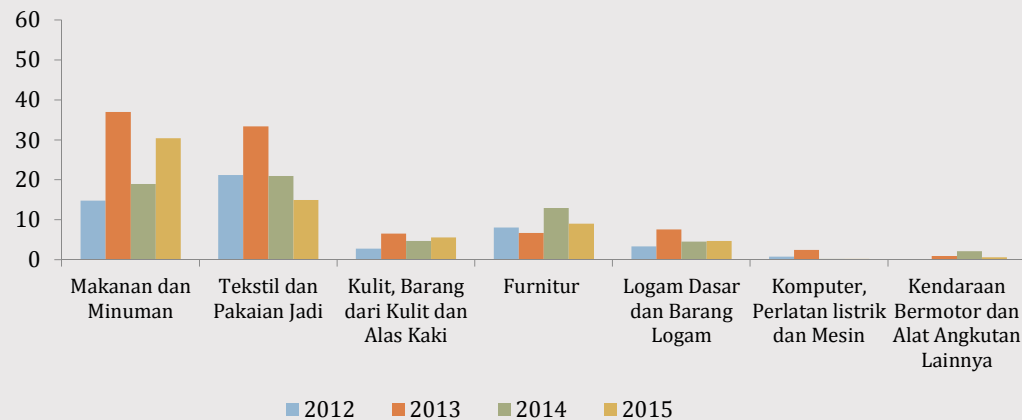
Nilai Tambah Industri Mikro
(Triliun Rupiah)



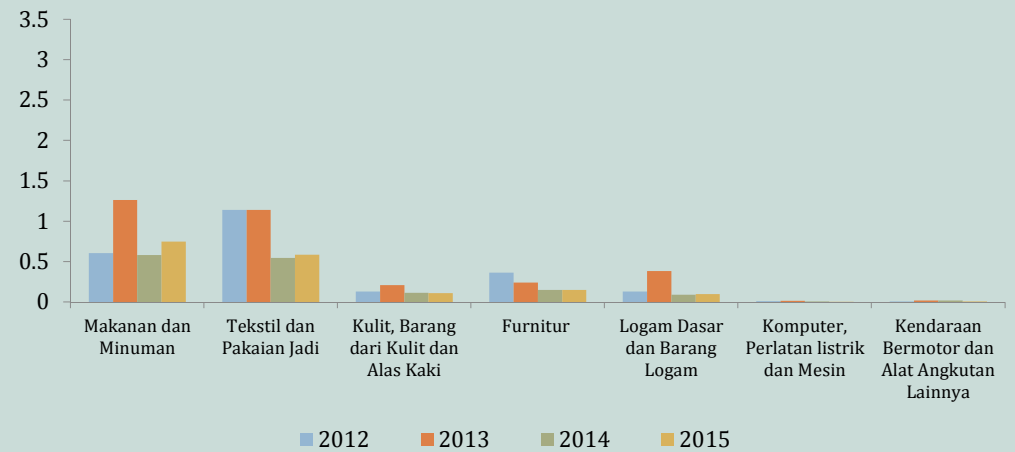
Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro (Juta Orang)



Nilai Tambah Industri Kecil



Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil (Juta Orang)



Sumber: Statistik Indonesia 2015 dan 2016, BPS

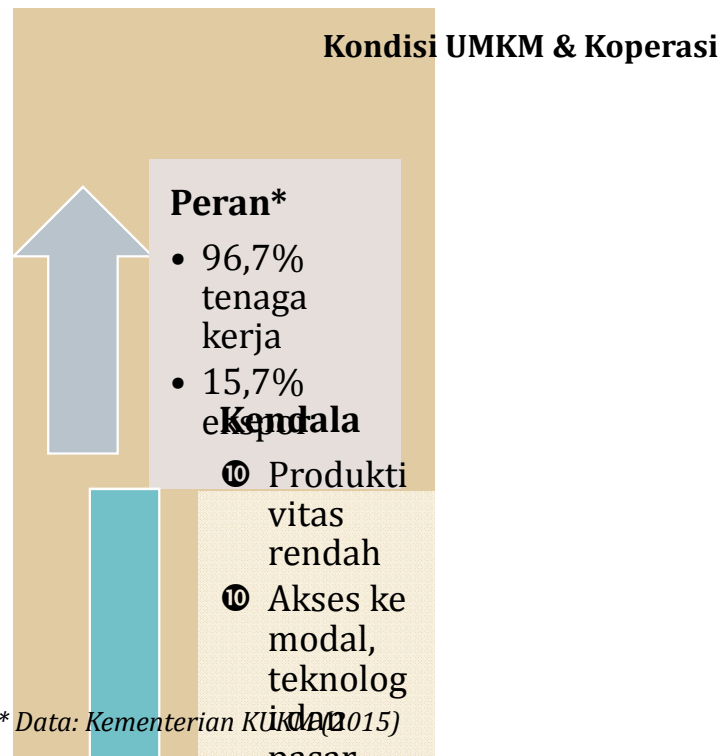


*Kementerian PPN/
Bappenas*

TANTANGAN DAN KENDALA

TANTANGAN

- Tingginya populasi usia produktif terhadap ketersediaan lapangan kerja (114 juta)
- Diperlukan terobosan untuk menciptakan usaha dan meningkatkan kerjasama dalam rangka mendorong perekonomian
- Semakin ketatnya persaingan ekonomi membuat maraknya pelaku UKM/STAR Up

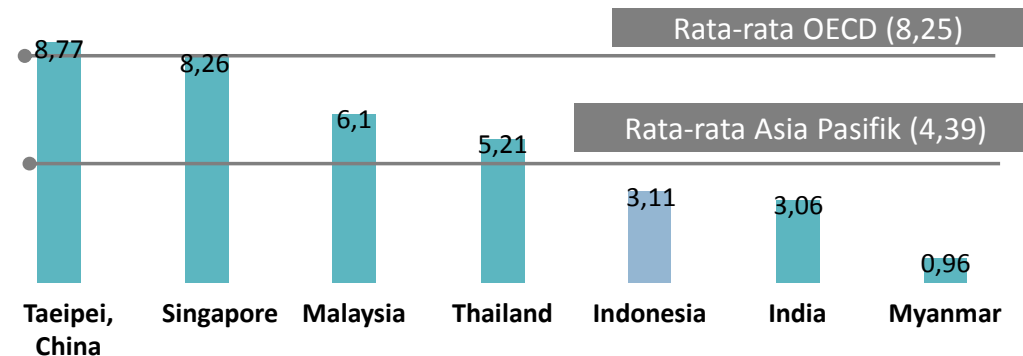


- Potensi yang besar perlu dicarikan upaya keberpihakan (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
- Indonesia merupakan salah satu negara pemilik pelaku UKM terbesar dibanding Asean

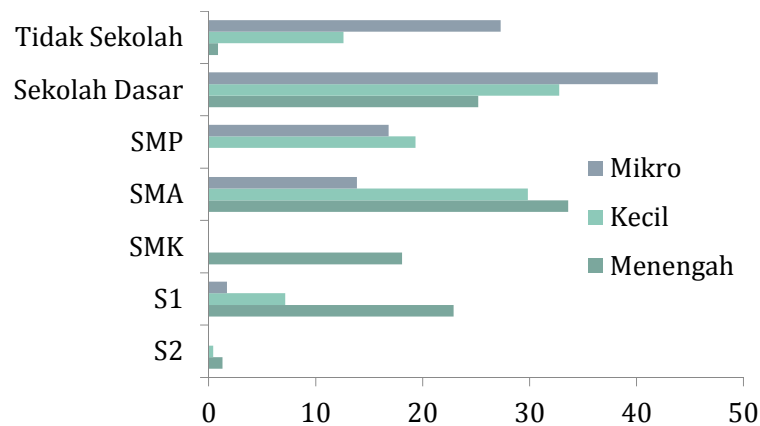
KONDISI EXISTING KUALITAS SDM

Kualitas SDM secara keseluruhan rendah (62 persen lulusan SLTP dan dibawahnya), mempengaruhi indeks pengetahuan ekonomi Indonesia.

Index pengetahuan ekonomi (KEI), asia



Pendidikan Tingkat Manajer dan Operator Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

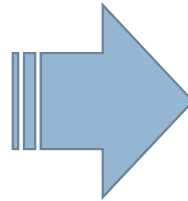


Distribusi Gaji Bulanan per Pekerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Persentil	Usaha Mikro- Kecil	Usaha Menengah
	Rp	Rp
1%	45.499,96	21.935,27
5%	125.000,00	102.492,60
10%	200.000,00	340.082,40
25%	41.999,72	718.599,50
50%	800.000,02	1.269.379,00
75%	1.499.999,11	1.934.691,00
90%	2.640.000,44	3.290.291,00
95%	3.791.665,35	5.264.466,00
99%	7.488.002,83	10.700.000,00

KENDALA UTAMA MELAKUKAN BISNIS

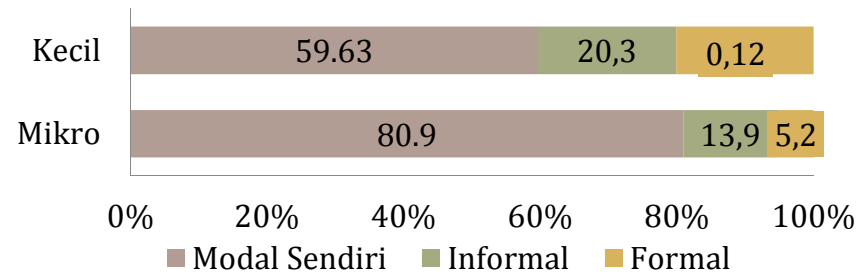
- Salah satu Faktor yang menghambat perkembangan UMK adalah Modal, pinjaman modal dengan suku bunga
- Suku bunga yang diberlakukan untuk UKM dan Konsumen dibandingkan dengan koperasi atau perusahaan besar, masih tinggi dibandingkan negara lain
- Rendahnya kepercayaan pihak keuangan kepada pelaku UKM menyebabkan penjaminan yang sulit dipenuhi.
- Dibutuhkan komunikasi yang dapat menjembatani tiap mitra dan para stakeholders (lembaga inkubator: PT, K/L, Swasta dan masyarakat lainnya) untuk memajukan UKM dan Star Up sbg solusi.



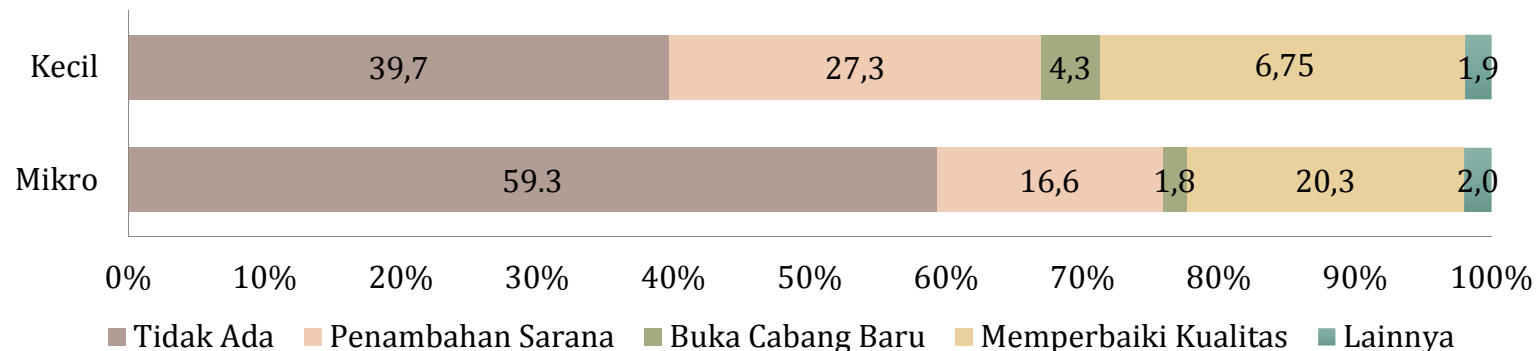
	Semua UKM (%)
Kendala kredit	19,9
Bahan mentah	18,8
Tenaga kerja dan SDM	17,2
Akses pasar	16,7
Penjualan dan distribusi	9,7
Perijinan	7,5
Pelatihan manajerial	3,2
Produksi	3,2
Teknologi produksi	2,2
Keuntungan dan pertumbuhan	1,6

SUMBER PERMODALAN USAHA MIKRO & KECIL

Sumber utama permodalan UMK masih modal sendiri, sementara sumber modal perbankan (formal) masih sangat kecil.



Padahal 60% usaha kecil dan 40% usaha mikro memiliki keinginan untuk ekspansi usaha dalam satu tahun ke depan



Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK)



MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM

UMKM
dalam persaingan usaha



Kunci: Produktivitas
➔ Indikator Efisiensi Sumberdaya



1. Peningkatan nilai tambah UKM
2. Kualitas produk
3. Upah karyawan



Bagaimana meningkatkan produktivitas UKM

Bahwa peningkatan produktivitas UKM tetap menjadi agenda utama pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.



Perlu identifikasi mengenai determinan pembentuk tingkat produktivitas UKM, sehingga langkah-langkah intervensi yang dilakukan benar-benar terfokus dan memberikan hasil yang optimal.



Walaupun tingkat produktivitas merupakan masalah internal perusahaan (pelaku usaha), tetapi bila hanya pelaku UKM saja yang berkomitmen untuk meningkatkan performa, produktivitas UKM akan berjalan lambat dan tidak memberikan hasil yang optimal.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

- Peningkatan produktivitas idealnya merupakan proses interaksi diantara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dan pelaku usaha/UKM.
- Sehingga peningkatan produktivitas merupakan interaksi diantara tiga determinan

1

Kualitas tenaga kerja, berkaitan dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan etos kerja

2

Kemampuan manajerialUKM , berkaitan dengan upaya perusahaan untuk melakukan inovasi, *capital deepening* (pendalaman kapital), peningkatan kemampuan teknologi (technological capabilities), sistem remunerasi, dan jenjang karir.

3

Lingkungan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik yang langsung ditujukan di bidang ketenagakerjaan ataupun penyediaan insentif untuk memfasilitasi peningkatan produktivitas



DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA UMKM

DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA UKM



Kemudahan perijinan:

*Fasilitasi kemudahan perijinan
sesuai Perpres No. 98 Tahun 2014
tentang Perizinan untuk Usaha
Mikro dan Kecil*

- ✓ Pemberian izin dalam bentuk satu lembar naskah legalitas yang diterbitkan Pemda (Kecamatan) bagi usaha mikro dan kecil
- ✓ Pemberian izin ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya
- ✓ Bentuk pemberdayaan yang dapat diakses usaha mikro dan kecil dengan adanya izin usaha tersebut mencakup kepastian dan perlindungan usaha, pendampingan usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan lainnya
- ✓ Penyediaan sistem registrasi usaha secara *on*



Peningkatan akses ke pembiayaan:

Penguatan start-up capital bagi wirausaha pemula

- ✓ Penguatan lembaga keuangan mikro dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan jangkauan layanannya bagi usaha mikro dan masyarakat lainnya
- ✓ Penyediaan skema kredit usaha mikro dengan dukungan penjaminan kredit
- ✓ Penyediaan pendampingan/penyiapan bagi usaha mikro yang akan mengajukan kredit usaha mikro berpenjaminan, dan selama pengelolaan kredit
- ✓ Penguatan permodalan koperasi pemula di wilayah miskin untuk memfasilitasi pengembangan usaha skala mikro oleh anggotanya
- ✓ Penyediaan *start-up capital* bagi wirausaha pemula, yang selama ini tidak dapat mengakses modal awal untuk memulai usaha

DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA UKM



Peningkatan keterampilan: *Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi SDM usaha mikro*

- ✓ Diklat bagi usaha mikro di bidang kewirausahaan, teknis, manajemen, keuangan, dan pemasaran
- ✓ Fasilitasi peningkatan keterampilan usaha melalui lembaga pendidikan di perdesaan
- ✓ Penyediaan pendampingan usaha melalui kerja sama dengan lembaga pendampingan bisnis swasta/perguruan tinggi



Peningkatan produktivitas: *Penguatan sentra usaha mikro, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan*

- ✓ Peningkatan produktivitas melalui penguatan sistem bisnis bagi koperasi/sentra usaha mikro dalam pengembangan komoditas unggulan, yang dilengkapi dengan bantuan penerapan teknologi, akses ke saprodi, dan pendampingan manajemen
- ✓ Fasilitasi pengembangan jaringan/kerja sama usaha antara koperasi/sentra usaha mikro dengan mitra usaha besar/menengah/kecil



Peningkatan akses pasar: *Revitalisasi pasar rakyat dan penataan pedagang kaki lima efektif*

- ✓ Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi, termasuk di daerah tertinggal, perbatasan dan mitigasi bencana
- ✓ Pendampingan manajemen pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi
- ✓ Fasilitasi penataan pedagang informal/kaki lima skala mikro di perkotaan dan wilayah tujuan wisata
- ✓ Fasilitasi promosi produk usaha mikro pada event lokal dan kepariwisataan

DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA UKM



Penguatan kelembagaan:
Pemasyarakatan koperasi dan peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (usaha sosial)

- ✓ Pemasyarakatan dan pendampingan perkoperasian bagi kelompok-kelompok usaha produktif yang telah terbentuk di masyarakat (kelompok usaha bersama/KUB/KUBE, poktan/gapoktan, kelompok nelayan, dll.)
- ✓ Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk usaha sosial dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro dan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif dan penyelesaian masalah sosial



Penguatan sistem pendukung usaha lainnya:
Peningkatan kualitas produk, pengenalan pasar ekspor, fasilitasi promosi, dukungan akses pembiayaan, dukungan akses ke listrik, layanan pendampingan usaha terpadu, penyuluhan perkoperasia

- ✓ Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang merek dan sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro di industri pengolahan makanan/minuman dan obat-obatan/jamu
- ✓ Penyelenggaraan pameran produk yang dapat diikuti oleh usaha mikro
- ✓ Sosialisasi dan ujioba ekspor untuk usaha mikro melalui peran *trading house*
- ✓ Pengembangan *credit rating* yang mencakup usaha mikro dalam rangka meningkatkan akses ke pembiayaan
- ✓ Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dikelola koperasi
- ✓ Peningkatan layanan pendampingan terpadu melalui Pusat Pendampingan Usaha terpadu di kabupaten/ kota
- ✓ Penyediaan penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat

PENUTUP

1. Salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi peningkatan produktivitas UKM adalah pemerintah.
2. Intervensi pemerintah dalam meningkatkan kinerja UKM dapat untuk memperbaiki lingkungan usaha agar pelaku usaha dan masyarakat berjalan baik.
3. Dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif akan memperbesar daya tarik UKM yang dapat memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kesenjangan